Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah
Vol 9, No.1, 2022, hlm. 61
http://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/es/index
ISSN-e 2715-7334 | ISSN-P 2654-3567

ANALISIS PERKEMBANGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

M.Ramadhan[1], Agus Tohawi[2], Moh.Saiful Musthofa[3]

[1]STIE Pancasetia Banjarmasin
[2] Institut Agama Islam Pangeran Diponegoro Nganjuk
[3] Institut Agama Islam Pangeran Diponegoro Nganjuk

E-mail: mr0633760@gmail.com
prodisyariahpd@gmail.com
Lufias84@gmail.com

Received: 23 October 2021 *Revised: 20 November 2021* *Accepted: Januari 2022*

ABSTRAK

Dalam menjalankan Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan yang efektif, etlsien, dan mampu mendorong peran masyarakat dalam meningkatkan pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Keberhasilan Otonomi Daerah tidak terlepas dari kemampuan dalam bidang keuangan. Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat perkembangan kemampuan keuangan di Kabupaten Nganjuk dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Nganjuk. Sedangkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data keuangan APBD di Kabupaten Nganjuk tahun anggaran 2001-2005. Adapun teknik pengumpulan data adalah dengan dokumentasi dan yang dilakukan di BKD Kabupaten Nganjuk. Metode Penelitian adalah Deskriptif Komparatif, dengan menggunakan beberapa rasio keuangan, yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, derajat desentralisasi tiskal, indeks kemempuan rutin, rasio keserasian dan rasio pertumbuhan. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut : Berdasarkan rasio kemandirian keuangan daerah yang ditunjukkan dengan angka rasio rata-ratanya adalah 7,88% masih berada diantara 0% - 25% tergolong mempunyai pola hubungan instruktif yang berarti kemampuan Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam memenuhi kebutuhan dana untuk penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Sosial masyarakat masih relatif rendah meskipun dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dan penurunan Dalam Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal hanya memiliki rata-rata 6,80%. hal ini berarti bahwa tingkat kemandirian/kemampuan keuangan Kabupaten Nganjuk masih rendah dalam melaksanakan otonominya. Berdasarkan rasio IKR rata-rata hanya sebesar 9,75 %, ini artinya PAD memiliki kemampuan yang sangat kurang untuk membiayai pengeluaran rutinnya. Pada Rasio Keserasian, pengeluaran belanja rutin lebih besar dibandingkan dengan belanja pembangunan. Sedangkan dalam Rasio Pertumbuhan, secara keseluruhan mengalami peningkatan disetiap tahunnya yang disebabkan bertambahnya pajak dan retribusi daerah.

Kata Kunci: Pemerintah daerah; otonomi daerah; Keuangan daerah.

This is an open access article under CC-BY-SA license.

PENDAHULUAN

Organisasi pemerintah merupakan salah satu bentuk organisasi non profit yang bertujuan meningkatan pelayanan kepada masyarakat umum yang dapat berupa peningkatan keamanan, peningkatan mutu pendidikan atau peningkatan mutu kesehatan dan lain-lain. Selain itu organisasi non profit ini merupakan organisasi yang orientasi utamanya bukan untuk mencari laba.

Apabila dibandingkan dengan organisasi lain, organisasi pemerintah memiliki karakteristik tersendiri yang lebih terkesan sebagai lembaga politik daripada lembaga ekonomi. Akan tetapi, sebagaimana bentuk-bentuk kelembagaan lainnya, lembaga / organisasi pemerintah juga memiliki aspek sebagai lembaga ekonomi. Lembaga pemerintahan melakukan berbagai bentuk pengeluaran guna membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukan di satu sisi, dan di sisi lain lembaga ini harus melakukan berbagai upaya untuk memperoleh penghasilan guna menutupi seluruh biaya tersebut.

Dalam melaksanakan aktivitas ekonominya, organisasi atau lembaga pemerintah membutuhkan jasa akuntansi untuk pengawasan dan menghasilkan informasi keuangan yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan-keputusan ekonominya. Akan tetapi, karena sifat lembaga pemerintahan berbeda dari sifat perusahaan yang bertujuan mencari laba, maka sifat akuntansi pemerintahan berbeda dari sifat akuntansi perusahaan. Dengan adanya akuntansi pemerintahan maka pemerintah harus mempunyai rencana yang matang untuk suatu tujuan yang dicita-citakan sesuai dengan penerapan akuntansi pemerintahan di Indonesia.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 jo Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah serta Undang-Undang No. 25 tahun 1999 jo Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pusat dan daerah akan dapat memberikan kewenangan atau otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara secara proporsional. Hal ini diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional, serta perimbangan keuangan daerah dan pusat secara demokratis, peran serta masyarakat, pemerataan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keragaman daerah, terutama kepada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota. Tujuan pemberian keuangan dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah adalah guna meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan sosial.

Menurut Undang-Undang No. 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 5. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan hal tersebut peranan pemerintah daerah sangat menentukan berhasil tidaknya menciptakan kemandirian yang selalu didambakan Pemerintah Daerah. Terlepas dari perdebatan mengenai ketidaksiapan daerah di berbagai bidang untuk melaksanakan kedua Undang-Undang tersebut, otonomi daerah diyakini merupakan jalan terbaik dalam rangka mendorong pembangunan daerah. Menggantikan system pembangunan terpusat yang oleh beberapa pihak dianggap sebagai penyebab lambannya pembangunannya di daerah dan semakin besarnya ketimpangan antar daerah.

Di dalam pelaksanaan Otonomi Daerah terdapat empat elemen penting yang diserahkan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Ke empat elemen tersebut menurut Cheema dan Rondinelli (dalam Anita Wulandari, 2001:17), adalah Desentralisasi Politik , Desentralisasi Fiskal, Desentralisasi Administrasi dan Desentralisasi Ekonomi. Keempat elemen tersebut menjadi kewajiban daerah untuk mengelola secara efisien dan efektif. Sehingga dengan demikian akan terjadi kemampuan / kemandirian suatu daerah untuk melaksanakan fungsinya dengan dengan baik. Salah satu elemen yang diserahkan pemerintah pusat kepada pemerintah deerah adalah desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal yang merupakan komponen utama dari desentralisasi pelaksanaan otonomi daerah dan menandai dimulainya babak baru dalam pembangunan daerah serta masyarakatnya dalam mengelola sumber daya / segenap potensi yang dimiliki untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan daerah.

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan tercermin dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan, serta pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

Salah satu ciri utama daerah mampu dalam melaksanakan otonomi daerah menurut Yuliati (2001:22), adalah terletak pada kemampuan keuangan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya dengan tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat mempunyai proporsi yang semakin mengecil dan diharapkan bahwa PAD harus menjadi bagian terbesar dalam memobilisasi dana penyelenggaraan pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan roda pemerintahan suatu daerah yang berdasar pada prinsip otonomi yang nyata, luas dan bertanggung jawab. Peran

Anita Wulandari (2001), melakukan penelitian tentang kemampuan keuangan daerah di kota Jambi dalam pelaksanaan Otonomi Daerah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, kota Jambi dihadapkan pada kendala rendahnya kemampuan keuangan daerah, yang dilihat dari rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah.

Widodo (2001), melakukan penelitian tentang Analisis Rasio Keuangan APBD Kabupaten Boyolali. Hasilnya menunjukkan bahwa kemandirian pemerintah daerah Boyolali dalam memenuhi kebutuhan dana untuk penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial kemasyarakatan masih relatif rendah dan cenderung menurun.

Dengan mengacu pada penelitian sebelumnya, tentu saja disesuaikan dengan kemampuan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki, penulis ingin mereplikasi dan mengembangkan penelitian-penelitian tersebut. Akan tetapi terdapat beberapa perbedaan, antara lain: (1) Periode penelitian. Penelitian ini dilakukan pada periode tahun 2001-2005, sedangkan penelitian sebelumnya pada periode sebelum tahun 2002. (2) Daerah penelitian. Penelitian ini mengambil daerah penelitian di Kabupaten Nganjuk, sedangkan peneliti terdahulu mengambil daerah penelitian di kota Jambi, Boyolali, dan Sragen. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui tingkat perkembangan kemampuan keuangan di Kabupaten Nganjuk dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif menurut Mohammad Nazir (2003:54) adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian ini : untuk membuat deskriptif / gambaran, melukiskan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselediki. Penelitian ini berusaha untuk mendapatkan gambaran tentang perkembangan kemampuan keuangan daerah di kabupaten Nganjuk dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

Data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dan melalui perantara / diperoleh dan dicatat oleh pihak lain (Nur Indriantoro dan Bambang Supomo,2002:147). Data sekunder dalam penelitian ini adalah data keuangan APBD tahun anggaran 2001-2005. APBD tersebut diperoleh dari beberapa instansi pemerintah terkait, dalam hal ini diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga

buku-buku tentang pendapat, teori, hukum-hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penyelidikan (Hadari Nawawi,1991:133).

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif komparatif. Deskriptif komparatif adalah suatu jenis metode penelitian yang ingin mencari jawab secara mendasar tentang sebab akibat dengan menganalisis faktor-faktor terjadinya atau munculnya fenomena tertentu (Mohammad Nazir, 2003:58).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis

Rasio keuangan yang digunakan dalam pembahasan pada bab IV ini adalah Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Indek Kemampuan Keuangan Rutin, Rasio Keserasian dan Pertumbuhan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2001-2005, sehingga dapat diketahui bagaimana kecendurungan yang terjadi.

Adapun data yang digunakan adalah data yang berasal dari arsip dokumen pada bagian anggaran kantor pemerintah Kabupaten Nganjuk yang berupa data APBD. Dari hasil APBD tersebut nantinya akan diketahui bagaimana kinerja keuangan APBD Kabupaten Nganjuk.

Adapun hasil dari Analisis Rasio APBD tersebut adalah sebagai berikut :

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rumus yang digunakan untuk menghitung Rasio Kemandirian Keuangan Daerah adalah :

$$\text{Rasio kemandiian} : \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Sumber Penduduk dari Pihak Ekstern}}$$

Hasil perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dapat dilihat dalam tabel IV.I dan IV.2 di bawah ini :

Tabel 1. Sumber Pendapatan Dari Pihak Ekstern

Keterangan	*2001*	*2002*	*2003*	*2004*	*2005*
Bagi hasil pajak *Bagi hasil bukan pajak*	*11.202.890742* *27.549.945*	*13.565.682.296* *461.718.716*	*21.527.918.400*	*25.074.688.097*	*27.700.950.309*
Bagi hasil pajak dan Bukan Pajak			*16.674.547.420*	*18.406.729.470*	*21.178.393.030*
DAU	*154.866.421.000*	*205.280.000.000*	*253.710.000.000*	*263.304.000.000*	*272.531.000.000*
DAK			*5.800.000.000*	*7.000.000.000*	*10.550.000.000*
Dana Darurat				*19.037.582.000*	*17.842.100.000*
Pinjaman Daerah	*15.000.000.000*				
Jumlah	*181.096.861.687*	*219.307.401.012*	*297.712.465.820*	*332.822.999.567*	*349.802.443.339*

Sumber: Perkembangan APBD Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001-2005

Tabel 2. Perhitungan Rasio Kemandirian Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001-2005

No	TA	Total Pendapatan	Pendapatan Asli Daerah		%	Sumber Pendapatan Dari Pihak Ekstern		%	Rasio Kemandirian	Ket.
			Rp	Perkembangan		Rp.	Perkembangan			
1	2001	211.957.612.729,31	14.787.714.098	-	6,98%	181.096.861.687	-	85,44%	8,17%	Instruktif
2	2002	265.092.756.153,31	18.555.317.620	25,48%	7%	219.307.401.012	21,10%	82,73%	8,46%	Instruktif
3	2003	338.998.068.834	19.929.269.513	7,40%	5,98%	297.819.592.420	35,80%	87,85%	6,69%	Instruktif
4	2004	354.676.585.322	21.702.124.540	8,90%	6,12%	313.936.878.782	5,41%	88,51%	6,91%	Instruktif
5	2005	380.338.167.080	30.384.474.927	40,00%	7,99%	332.111.592.153	5,79%	87,32%	9,15%	Instruktif
Rata-rata					20,45%		17,03%		7,88%	Instruktif

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan tabel IV.2 terlihat bahwa PAD dan sumber pendapatan dari pihak ekstern selalu meningkat. PAD yang semula di tahun 2001 sebesar Rp.14.787.714.098,- atau sebesar 6,98 % dari total pendapatan, selanjutnya pada tahun 2002 dan tahun 2003 PAD mengalami kenaikan sebesar Rp.18.555.317.620,- dan Rp19.929.269.513,- atau sebesar 7 % dan 5,98 % dari total pendapatan. Pada tahun 2004 dan tahun 2005 mengalami kenaikan kembali sebesar Rp.21.702.124.540,- dan Rp30.384.474.927,- atau sebesar 6,12 % dan 7,99 % dari total pendapatan, sehingga rata-rata pertumbuhan PAD sebesar 20,44 %.

Sumber pendapatan dari pihak ekstern juga mengalami peningkatan yang semula pada tahun 2001 sebesar Rp.181.096.861.687,- atau 85,44 % dari total pendapatan, kemudian pada tahun 2002 dan tahun 2003 mengalami peningkatan sebesar 21,10 % dan 35,80 % menjadi Rp.219.307.401.012 dan Rp.297.819.592.420 atau sebesar 82,73 % dan 87,85 % dari total pendapatan, lalu pada tahun 2004 dan tahun 2005 mengalami peningkatan menjadi Rp.313.936.878.782,- dan Rp. 332.111.592.153,- atau 88,51 % dan 87,32 % dari total pendapatan. Dari kenaikan diatas menjadikan rata-rata pertumbuhan sumber pendapatan dari pihak ekstern 17,03 %

Pada rasio kemandirian mengalami peningkatan dan penurunan. Pada tahun 2001 rasio kemandirian mencapai 8,17 % dan pada tahun 2002 naik menjadi 8,46 %. Selanjutnya pada tahun 2003 dan tahun 2004 mengalami penurunan menjadi 6,69 % dan 6,91 %. Sedangkan pada tahun 2005 mengalami kenaikan menjadi 9,15 %. Sehingga rata-rata rasio kemandirian adalah sebesar 7,28 %.

Menurut uraian dan perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa rasio kemandirian selama lima tahun pada Kabupaten Nganjuk memiliki rata-rata tingkat kemandirian masih rendah dan dalam kategori kemampuan keuangan kurang dengan pola hubungan instruktif yaitu peranan pemerintah pusat sangat dominan dari pada daerah, hal ini dapat dilihat dari rasio kemandirian yang dihasilkan masih antara 0-25 %. Rasio kemandirian yang masih rendah mengakibatkan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Nganjuk dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan masih sangat terrgantung pada penerimaan dari pemerintah pusat.

Rasio kemandirian yang masih rendah dapat disebabkan pada sumber penerimaan daerah dan dasar pengenaan biaya, tampaknya Pendapatan Asli Daerah masih belum dapat diandalkan bagi daerah untuk otonomi daerah, karena relatif rendahnya basis pajak / retribusi yang ada di daerah dan kurangnya pendapatan asli daerah yang dapat digali oleh pemerintah daerah. Hai ini dikarenakan sumber-sumber potensial untuk menambah Pendapatan Asli Daerah masih dikuasai oleh pemerintah pusat. Sedangkan untuk basis pajak yang cukup besar masih dikelola oleh pemerintah pusat, yang di dalam pemungutan / pengenaannya berdasarkan undang-undang / peraturan pemerintah, dan daerah hanya menjalankan serta akan menerima bagian dalam bentuk dana perimbangan. Dana perimbangan itu sendiri terdiri dari : Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak / SDA, DAU, DAK, penerimaan lainnya.

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah daerah harus mampu mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah ada. Inisiatif dan kemauan pemerintah daerah sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan PAD. Pemerintah daerah harus mencari alternatif-alternatif yang memungkinkan untuk dapat mengatasi kekurangan pembiayaannya, dan hal ini memerlukan kreaitifitas dari aparat pelaksana keuangan daerah untuk mencari sumber-sumber pembiayaan baru baik melalui program kerjasama pembiayaan dengan pihak swasta dan juga program peningkatan PAD misalnya pendirian BUMD sektor potensial.

2. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

DDF : $\frac{PAD_t}{TPD_t}$ x 100 %

Keterangan :

DDF : Derajat Desentralisasi Fiskal

PAD_t : Total PAD tahun E

TPD_t : Total Pendapatan Daerah Tahun

Hasil perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dilihat dalam tabel 3 berikut ini :

Tabel 3 Kontribusi PAD terhadap TPD Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001-2005

Tahun Anggaran	PAD (Rp)	TPD (Rp)	%	Kemampuan Keuangan
2001	14.787.714.098	211.957.612.729,31	6,98%	Sangat kurang
2002	18.555.317.620	265.092.756.153,31	7,00%	Sangat kurang
2003	19.929.269.513	338.998.068.834	5,88%	Sangat kurang
2004	21.702.124.540	354.676.585.322	6,12%	Sangat kurang
2005	30.384.474.927	380.338.167.080	7,99%	Sangat kurang
Rata-rata			6,80%	Sangat kurang

Sumber : Data diolah

Berdasar tabel 3 terlihat bahwa Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk penurunan dan kenaikan walaupun relatif kecil. Pada tahun 2001 rasio derajat desentralisasi fiskal mencapai 6,98 % dan pada tahun 2002 mengalami kenaikan menjadi 7,00 % dan pada tahun 2003 turun menjadi 5,88 %. Kemudian pada tahun 2004 dan 2005 mengalami kenaikan yaitu sebesar 6,12 % dan 7.99 %. Sehingga rata-rata Derajat Desentralisasi Fiskal adalah: 6,80 %.

Menurut uraian dan perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal selama lima tahun pada pemerintahan Kabupaten Nganjuk masih dalam skala interval yang sangat kurang, karena masih berada dalam skala interval antara 0,00-10,00 yaitu sebesar 6,84 % dan ini berarti bahwa PAD mempunyai kemampuan yang sangat kurang dalam membiayai pembangunan daerah. Hal ini terjadi karena PAD di Kabupaten Nganjuk masih relatif kecil dibandingkan dengan Total Pendapatan Daerah dan Kabupaten Nganjuk dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan masih sangat tergantung pada sumber keuangan yang berasal dari pemerintah pusat.

3. Rasio Indeks Kemampuan Rutin

Indeks Kemampuan Rutin dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{IKR} : \frac{PAD}{Total\ Pengeluaran\ Rutin} x100\%$$

Keterangan :

IKR : Indeks Kemampuan Rutin

PAD : Pendapatan Asli Daerah

Hasil perhitungan rasio Indeks Kemampuan Rutin dapat dilihat dalam tabel 4 di bawah ini :

Tabel 4 Kontribusi PAD terhadap Pengeluaran Rutin Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001-2005

Tahun Anggaran	*PAD (Rp)*	*Penegeluaran Rutin (Rp)*	*%*	*Kemampuan Keuangan*
2001	*14.787.714.098*	*172.409.454.300*	*8,58%*	*Sangat kurang*
2002	*18.555.317.620*	*203.481.504.710*	*9,12%*	*Sangat kurang*
2003	*19.929.269.513*	*214.109.496.890*	*9,31%*	*Sangat kurang*
2004	*21.702.124.540*	*238.609.850.490*	*9,09%*	*Sangat kurang*
2005	*30.384.474.927*	*240.193.449.074*	*12,65%*	*Sangat kurang*
Rata-rata			*9,75%*	*Sangat kurang*

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel 4 terlihat bahwa Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Pengeluaran Rutin Daerah Kabupaten Nganjuk dari tahun ke tahun menunjukkan keadaan yang tidak stabil dan selalu berubah-rubah. Pada tahun 2001 dan 2002 rasio Indeks Kemapuan Rutin mencapai 8,58 % dan 9,12 %. Selanjutnya pada tahun 2003 mengalami kenaikan menjadi 9,31 % dan pada tahun 2004 menurun menjadi 9,09 %. Pada tahun 2005 rasio Indeks Kemampuan Rutin mengalami peningkatan yaitu menjadi sebesar 12,65 %.

Menurut uraian dan perhitungan pada tabel IV.4 dapat disimpulkan bahwa Rasio Indeks Kemampuan Rutin selama lima tahun pada pemerintahan Kabupaten Nganjuk masih dalam skala yang sangat kurang, karena masih berada dalam skala interval antara 0,00-20,00 yaitu sebesar 9,75 % dan ini berarti bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD)

mempunyai kemampuan yang kurang untuk membiayai pengeluaran rutin, hal ini terjadi karena PAD Kabupaten Nganjuk sangat kecil, dan selama ini lebih banyak tergantung pada sumber keuangan yang berasal dari pemerintah pusat.

4. Rasio Keserasian

Rasio keserasian yang digunakan dalam analisis ini menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio Belanja Rutin} : \frac{Total\ Belanja\ Rutin}{Total\ Belanja\ APBD}$$

$$\text{Rasio Belanja Pembangunan} : \frac{Total\ Belanja\ Pembangunan}{Total\ Belanja\ APBD}$$

Hasil perhitungan analisis rasio keserasian dapat dilihat dalam 5 dibawah ini :

Tabel 5 Belanja Rutin, Pembangunan dan total APBD Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001-2005

No	Tahun Anggaran	Total Belanja (Rp)	Realisasi Belanja Rutin		Realisasi Belanja Pembangunan		Rasio Belanja Rutin	Rasio Belanja Pembangunan
			Rp.	Perkembangan	Rp.	Perkembangan		
1	2001	205.601.789.144	172.409.454.300	-	33.192.334.844	-	83,86%	16,14%
2	2002	239.662.082.558	203.481.504.710	18,02%	36.180.577.848	9,02%	84,90%	15,10%
3	2003	336.907.115.882	214.109.496.890	5,22%	64.889.597.394	79,35%	63,55%	19,26%
4	2004	328.493.367.602	238.609.850.490	11,44%	29.516.305.569	(54,51%)	72,64%	8,99%
5	2005	329.236.579.536	240.193.449.074	0,66%	31.152.651.535	5,54%	72,95%	9,46%

Sumber: Data diolah

Dari hasil perhitungan tabel 5 diatas, menunjukkan bahwa belanja rutin tahun 2001 sebesar Rp.172.409.454.300,- mengalami kenaikan menjadi Rp.203.481.504.710,- atau sebesar 18,02 % pada tahun 2002. Kemudian pada tahun 2003 dan 2004 belanja rutin naik menjadi Rp. 214.109.496.890,- dan Rp.238.609.850.490,- atau sebesar 5,22 % dan 11,44 %. Pada tahun 2005 kembali mengalami kenaikan menjadi Rp.240.193.449.074,- atau sebesar 0,66 %. Sedangkan untuk belanja pembangunan masih belum stabil dari tahun ke tahun. Pada tahun 2001 sebesar Rp.33.192.334.844,- naik ditahun 2002 menjadi Rp.36.180.577.848,- atau sebesar 9,02 %. Kemudian pada tahun 2003 mengalami kenaikan tajam menjadi Rp.64.889.597.394,- atau sebesar 79,35 %. Selanjutnya pada tahun 2004 turun menjadi Rp.29.516.305.569,- atau sebesar (54,51 %) kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2005 yaitu menjadi Rp.31.152.651.535,- atau sebesar 5,54 %.

Dari tabel diatas juga dapat dilihat rasio belanja rutin dan belanja pembangunan yang belum stabil. Pada tahun 2001 rasio belanja rutin dan rasio belanja pembangunan sebesar 83,86 % dan 16,14 %. Sedangkan pada tahun 2002 rasio belanja rutin naik menjadi 84,90 % dan rasio belanja pembangunan turun menjadi 15,10 %. Selanjutnya pada tahun 2003 rasio belanja rutin turun menjadi 63,55 % dan rasio belanja pembangunan mengalami kenaikan menjadi 19,26 %. Pada tahun 2004 rasio belanja rutin naik menjadi 72,64 % dan rasio belanja pembangunan turun menjadi 8,99%. Kemudian pada tahun 2005 rasio belanja rutin dan rasio belanja pembangunan naik menjadi 72,95 % dan 9,46 %.

Menurut uraian dan perhitungan diatas bahwa sebagian besar dana yang dimiliki pemerintah daerah masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja rutin sehingga rasio belanja pembangunan terhadap APBD relatif kecil. Ini dapat dibuktikan dari rasio belanja rutin yang selalu lebih besar dari rasio belanja pembangunan dan tingkat pertumbuhan belanja rutin jauh lebih besar dari pada tingkat pertumbuhan belanja pembangunan. Besarnya alokasi dana untuk belanja rutin terutama dikarenakan

besarnya dinas-dinas otonomi dan belanja pegawai untuk gaji PNS. Dengan ini dapat menunjukkan pemerintah Kabupaten Nganjuk yang lebih condong pada ekonomi kerakyatan belum memperhatikan pembangunan daerah, walaupun belanja pembangunan yang selalu naik meskipun relatif kecil. Hal ini dikarenakan belum ada patokan yang pasti untuk belanja pembangunan, sehingga pemerintah daerah masih berkonsentrasi pada pemenuhan belanja rutin yang mengakibatkan belanja pembangunan untuk pemerintah Kabupaten Nganjuk kecil atau belum terpenuhi.

5. Rasio Pertumbuhan

Rumus yang digunakan untuk menghitung Rasio pertumbuhan adalah sebagai berikut :

r : $\frac{Pn - Po}{Po} x100\%$

Keterangan :

Pn : Data yang dihitung pada tahun ke-n

Po : Data yang dihitung pada tahun ke-0

r : Pertumbuhan

Hasil perhitungan analisis rasio pertumbuhan dapat dilihat dalam tabel 6 dibawah ini :

Tabel 6. Rasio pertumbuhan APBD Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001-2005

No	*Keterangan*	*2001*	*2002*	*2003*	*2004*	*2005*
1	*PAD*	*14.787.714.098*	*18.555.317.620*	*19.929.269.513*	*21.702.124.540*	*30.384.474.927*
2	*Pertumb PAD*	*–*	*25,48%*	*7,40%*	*8,90%*	*40,0%*
3	*Total Pendapatan*	*211.957.612.729,31*	*265.092.756.153,31*	*338.998.068.834*	*354.676.585.322*	*380.338.167.080*
4	*Pertumb. Pdpt*	*–*	*25,07%*	*27,88%*	*4,62%*	*7,23%*
5	*Biaya Rutin*	*172.409.454.300*	*203.481.504.710*	*214.109.496.890*	*238.609.850.490*	*240.193.449.074*
6	*Pertmbh. B. Rutin*	*–*	*18,02%*	*5,22%*	*11,44%*	*0,66%*
7	*B. Pembangunan*	*33.192.334.844*	*36.180.577.848*	*64.889.597.394*	*29.516.305.569*	*31.152.651.535*
8	*Pertmb. B. Pembang*	*–*	*9,02%*	*79,35%*	*(54,51%)*	*5,54%*

Sumber: Data diolah

Dari perhitungan Tabel 6 diatas dapat diketahui bahwa pertumbuhan pendapatan asli daerah tahun 2001 sebesar Rp.14.787.714.098,- naik pada tahun 2002 menjadi Rp. 18.555.317.620,- atau sebesar 25,48 %. Lalu pada tahun 2003 dan 2004 pendapatan asli daerah mengalami kenaikan menjadi Rp.19.929.269.513,- dan Rp.21.702.124.540,- atau sebesar 7,40 % dan 8,90 %. Kemudian pada tahun 2005 pendapatan asli daerah mengalami kenaikan menjadi Rp.30.384.474.927,- atau sebesar 40,00 %. Kenaikan rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah lebih banyak dipengaruhi kenaikan pemungutan pajak dan retribusi daerah. Begitu juga untuk pertumbuhan pandapatan, pada tahun 2001 mengalami kenaikan dari Rp.211.957.612.729,31,- menjadi Rp.265.092.756.153,31,-

pada tahun 2002 atau sebesar 25,07 %. Pada tahun 2003 rasio pertumbuhan pada total pendapatan mengalami peningkatan pertumbuhan sebesar 27,88 % yaitu pada tahun 2002 Rp.265.092.756.153,31,- menjadi Rp.338.998.068.834,-. Selanjutnya pada tahun 2004 dan 2005 juga mengalami kenaikan menjadi Rp.354.676.585.322,- dan Rp.380.338.167.080 atau sebesar 4,62 % dan 7,23 %.

Pada rasio pertumbuhan belanja rutin mengalami kenaikan pada tahun 2001 sebesar Rp.172.409.454.300,- menjadi Rp.203.481.504.710,- pada tahun 2002 atau sebesar 18,02 %. Pada tahun 2003 dan 2004 belanja rutin kembali naik menjadi Rp.214.109.496.890,- dan Rp.238.609.850.490,- atau sebesar 5,22 % dan 11,44 %. Kemudian pada tahun 2005 juga mengalami kenaikan menjadi Rp.240.193.449.074,- atau sebesar 0,66 %.

Pada rasio perkembangan belanja pembangunan juga mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2002 mengalami kenaikan yang semula Rp.33.192.334.844,- menjadi Rp.36.180.577.848,- atau sebesar 9,02 %. Selanjutnya pada tahun 2003 mengalami kenaikan menjadi Rp.64.889.597.394,- atau sebesar 79,35 %. Sedangkan pada tahun 2004 mengalami penurunan menjadi Rp.29.516.305.569,- atau (54,51 %). Dan pada tahun 2005 mengalami kenaikan menjadi Rp.31.152.651.535,- atau sebesar 5,54 %.

Menurut uraian dan perhitungan diatas kondisi pertumbuhan APBD Kabupaten Nganjuk dapat disimpulkan bahwa APBD pada tahun anggaran 2001-2005 menunjukkan pertumbuhan rata-rata yang positif meskipun ada kecenderungan pertumbuhannya semakin berkurang. Hal ini dapat dilihat dari rasio belanja pembangunan tahun 2004.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan hasil analisis data dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan rasio kemandirian keuangan daerah yang ditunjukkan dengan angka rasio rata-ratanya adalah 7,88 % masih berada diantara 0 %-25 % tergolong mempunyai pola hubungan instruktif yang berarti kemampuan Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam memenuhi kebutuhan dana untuk penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan, dan Pelayanan Sosial masyarakat masih relatif rendah meskipun dari tahun ke tahun terus meningkat. Sedangkan tingkat ketergantungan pada sumber pendapatan dari pihak ekstern yang masih cukup tinggi disebabkan karena sumber-sumber keuangan potensial negara adalah milik pemerintah pusat.

Berdasarkan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, selama 5 (lima) tahun Derajat Desentralisasi Fiskal adalah sangat kurang karena hanya memiliki rata-rata 6,84 %, hal ini berarti bahwa tingkat kemandirian / kemampuan keuangan Kabupaten Nganjuk masih rendah dalam melaksanakan otonominya.

Berdasarkan kemampuan PAD untuk membiayai pengeluaran rutin daerah, yang sering disebut juga dengan IKR (Indeks Kemampuan Rutin) rata-rata hanya sebesar 9,75 %, ini artinya IKR di Kabupaten Nganjuk sangat kurang karena masih berada dalam skala interval antara 0,00-20,00. Hal ini berarti PAD memiliki kemampuan yang sangat kurang untuk membiayai pengeluaran

rutinnya dan pemerintah Kabupaten Nganjuk masih tergantung pada sumber penerimaan keuangan dari pemerintah pusat.

Berdasarkan rasio Keserasian, pengeluaran belanja rutin lebih besar dibandingkan dengan belanja pembangunan. Besarnya belanja rutin ini dikarenakan besarnya belanja pegawai.

Berdasarkan Rasio Pertumbuhan, secara keseluruhan mengalami peningkatan disetiap tahunnya yang disebabkan bertambahnya penerimaan pajak dan retribusi daerah.

REFERENSI

Abdul Halim. (2001). *Manajemen Keuangan Daerah,* Yogyakarta: UPP YKPN.

Abdul Halim. (2002). *Akuntansi Sektor Publik.* Jakarta : Salemba Empat.

Anita Wulandari. 2001. Kemampuan Keuangan Daerah. *Jurnal Kebijakan dan Adminislrasi Publik Vol 5 No 2 November*

Bahtiar Arif, Muchlis, Iskandar. (2002). *Akuntansi Pemerintahan,* Jakarta : Salemba Empat.

Biro Pusat Statistik.(2005). Nganjuk *Dalam Angka 2004.* BPS Nganjuk.

Hadari Nawawi. (1991). *Metode Penelitian Bidang Sosial.* Yogyakarta : UGM Press.

Helfert, Erich. (2000). *Teknikanalisa Keuangan.* Jakarta : Erlangga.

Kifliansyah. (2001). Analisa Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, *Manajemen Keuangan Daerah.* Yogyakarta : UPP YKPN.

Kustadi Arinta. (1996). *Pengantar Akuntansi Pemerintahan.* Bandung : Citra Aditya Bakti.

Mohammad Jimmi Ibrahiin. (1991). *Prospek Otonomi Daerah.* Semarang : Dahara Prize.

Mohammad Nazir. (2003). *Metode Penelitian.* Jakarta : Ghalia Indonesia.

Mudrajat Kuncoro. (1997). *Kkonomi Pembangunan : Teori, masalah-masalah dan kebijakan.* Yogyakarta : UPP YKPN.

Natahiddin. (2001). Potensi dana perimbangan pada pemerintahan daerali di Propinsi Jambi, *Manajemen Keuangan Daerah.* Yogyakarta : UPP YKPN.

Nirzawan. (2001), Tinjauan umum terhadap sistem pengelolaan Keuangan Daerah di Bengkulu Utara, *Manajemen Keuangan Daerah.* Yogyakarta : UPP YKPN. v-

Nur Indriantoro, Bambang Supomo. 2002. *Metode Penelitian Bisnis.* Yogyakarta: BPFE.

Revrisond Baswir. (2000). *Akuntansi Pemerintahan Indonesia.* Yogyakarta: BPFE.

Slamet Munawir. (1995). *Analisa Laporan Keuangan.* Yogyakarta: Liberty.

Suparmoko. (2002). *Ekonomi Publik.* Yogyakarta: ANDI.

UU RI. 2004. *Undang-UndangRipublik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.*

UU RI. 2004. *Undang-UndangRipublik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.*

UU RI. (2000). *Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.*

Widodo.(2001). Analisa Rasio Keuangan pada APBD Boyolali, *Manajemen Keuangan Daerah.* Yogyakarta: UPP YKPN.

Yuliati. (2001). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dalam menghadapai Otonomi Daerah, *Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta*: UPP YKPN.

.